

DAFTAR DOKUMEN EKSTERNAL

A. UNDANG – UNDANG & PERATURAN

NO	DOKUMEN	TANGGAL	TENTANG	TEMPAT PENYIMPANAN
1.	Undang - Undang No.36 Tahun 2009		kesehatan	Rak R.TU No 2
2.	Undang - Undang No.44 Tahun 2009		Rumah Sakit	Rak R.TU No 2
3.	Undang Undang No.29 Tahun 2004		Praktik Kedokteran	Rak R.TU No 2
4.	Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009		Pekerjaan Kefarmasian	Rak R.TU No 2
5.	Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 269/MENKES/PER/III/2008		Rekam Medis	Rak R.TU No 2
6.	Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 406/Menkes/SK/VI/2009		Pedoman Pelayanan Kesehatan Jiwa Komunitas	Rak R.TU No 2
7.	Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2052/MENKES/PER/X/2011		Izin Praktek dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran	Rak R.TU No 2
8.	Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 755/MENKES/PER/IV/2011		Penyelenggaraan Komite medik di rumah sakit	Rak R.TU No 2
9.	Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 340/MENKES/ PER/ III/ 2010		Klasifikasi Rumah Sakit	Rak R.TU No 2
10.	Peraturan Menteri Negara Pendayaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi nomor 26 tahun 2011		Pedoman perhitungan jumlah kebutuhan pegawai negeri sipil untuk Daerah	Rak R.TU No 2
11.	Peraturan Daerah Provinsi kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2012		Retribusi Jasa Umum	Rak R.TU No 2
12.	Peraturan gubernur Kalimantan Timur Nomor 9 tahun 2012		Petunjuk Pelaksanaan Peraturan daerah Provinsi Kalimantan timur nomor 2 tahun 2012 tentang retribusi jasa usaha	Rak R.TU No 2
13.	Peraturan Daerah Provinsi kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2012		Retribusi jasa usaha	Rak R.TU No 2
14.	Peraturan gubernur Kalimantan Timur Nomor 8 tahun 2012		Petunjuk Pelaksana peraturan daerah Peraturan Daerah Provinsi kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2012	Rak R.TU No 2

Tgl terbit 23 april 2013

15.	Peraturan gubernur Kalimantan Timur Nomor 9 tahun 2012		Perencanaan Pencapaian Standar Pelayanan minimal Bidang sosial Tahun 2011 - 2015	Rak R.TU No 2
16.	Peraturan gubernur Kalimantan Timur Nomor 51 tahun 2013		Standar Pelayanan Minimal Pada Rumah sakit jiwa Daerah atma Husada Mahakam	Rak R.TU No 2
17.	Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 89/Menkes/SK/II/2013		Formularium Program Jaminan Kesehatan Masyarakat	Rak R.TU No 2
18.	Peraturan gubernur Kalimantan Timur Nomor 40 tahun 2010		Ketentuan Naskah dinas dilingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur	Rak R.TU No 2
19.	Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 571/MENKES/SK/VI/2008		Standar Profesi Okupasi Terapi	
20.	Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 374/MENKES/SK/III/2007		Standar Profesi Gizi	
21.	Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 377/MENKES/SK/III/2007		Standar Profesi Pelayanan Medis dan Informasi Kesehatan	
22.	Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 573/MENKES/SK/VI/2008		Standar Profesi Asisten Apoteker	
23.	Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 631/MENKES/SK/VI/2008		Pedoman Peraturan Internal Staf Medis (Medical Staf By Law), di Rumah Sakit	
24.	Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 220/MENKES/SK/III/2002		Pedoman Umum Tim Pembina, Tim Pengarah, Tim Pelaksana kesehatan Jiwa Masyarakat (TP KJN)	
25.	Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 373/MENKES/SK/III/2007		Standar Profesi Sanitarian	
26.	Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor :1438/MENKES/PER/IX/2010		Standar Pelayanan Kedokteran	
27.	Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor :971/MENKES/PER/XI/2009		Standar Kompetensi Pejabat Struktural Kesehatan	
28.	Undang - Undang No. 35 Tahun 2009		Narkotika	
29.	Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004		Pemerintah Daerah	
30.	Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1966		Kesehatan Jiwa	
31.	Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009		Pekerjaan Kefarmasian	

Tgl terbit 23 april 2013

32.	Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 1998		Pengaman Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan	
33.	Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1787/MENKES/ PER/ XII/ 2010		Iklan dan Publikasi Pelayanan Kesehatan	
34.	Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 129/Menkes/ SK/ II/ 2008		Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit	
35.	Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.02.02/ MENKES/068 /I /2010		Kewajiban Menggunakan Obat Generik di fasilitas Pelayanan Kesehatan	
36.	Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 092/MENKES/ SK/ II/ 2012		Harga Eceran Tertinggi Obat Generik Tahun 2012	
37.	Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 328/Menkes/ SK/ VIII/2013		Formularium Nasional	
38.	Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 406/Menkes/SK/VI/2009		Pedoman Pelayanan Kesehatan Jiwa Komunitas	
39.	Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2002		Keuangan Negara	
40.	Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004		Pemerintah Daerah	
41.	Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 420/MENKES/SK/III/2010		Pedoman Layanan Terapi dan Rehabilitasi Komperhensif pada Gangguan Napza berbasis rumah sakit	
42.	Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 421/MENKES/SK/III/2010		Standar Pelayanan Terapi dan Rehabilitasi gangguan penggunaan NAPZA.	
43.	Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2012		Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja	
44.	Paeraturan Daerah provinsi Kalimantan Timur Nomor 13 Tahun 2008		Pokok – pokok pengelolaan keuangan daerah	
45.	Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2005		Pengelolaan keuangan Badan layanan umum	
46.	Peraturan menteri dalam negeri nomor 61 tahun 2007		Pedoman teknis pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah	
47.	Peraturan menteri keuangan nomor 07 / PMK.02/2006		Persyaratan administratif dalam rangka pengusulan dan penetapan satuan kerja instansi pemerintah untuk menerapkan pola pengelolaan keuangan badanlayanan umum	

Tgl terbit 23 april 2013

48.	Peraturan Menteri Keuangan Nomor 08/PMK.02/2006		Tentang kewenangan pengadaan barang/jasa pada badan layanan umum	
49.	Peraturan Menteri Keuangan Nomor 09/PMK.02/2006		Pembentukan dewan pengawas pada badan layanan umum umum	
50.	Peraturan menteri keuangan nomor 10 /PMK.02/2006		Pedoman penetapan remunerasi bagi pejabat pengelolaan dewan pengawas dan pegawai badan layanan umum	
51.	Peraturan gubernur kalimantan timur nomor 32 tahun 2008		Pedoman teknis pengelolaan keuangan dan akuntansi rumah sakit umum daerah provinsi kalimantan timur sebagai badan layanan umum daerah (BLUD)	
52.	Undang – Undang nomor 13 tahun 2003		ketenagakerjaan	
53.	Undang – Undang nomor 01 Tahun 1970		Keelamatan Kerja	

Tgl terbit 23 april 2013